

KAJIAN SOSIOLOGI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PERKEBUNAN INTI RAKYAT (PIR) V ARSO, KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA

Rahmalia Ayu Isnaini¹, Rimba Rahmawati², Muhamad Yusuf³, Zulihi⁴, Didik Efendy⁵,
Rachmad Surya Muhandy⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua

Email: iniayyy4@gmail.com¹, rimbarahmawati22@gmail.com², joesoef1974@gmail.com^{3*},
zulihi@iainfmpapua.ac.id⁴, didik.kotjap@gmail.com⁵, muhandy.rachmads@gmail.com⁶

*Korespondensi: joesoef1974@gmail.com

(Submission 03-02-2025, Revisions 31-05-2025, Accepted 04-06-2025)

Abstract

This study aims to comprehensively explain the development of the Nucleus Estate and Smallholder (NES/Perkebunan Inti Rakyat) Program in the PIR V region of Arso District, Keerom Regency, Papua Province. Using the analytical framework of Sociology through the application of Max Weber's social action theory, Gramsci's hegemony theory, and ideas about empathy and a sense of justice from Adam Smith, this article focuses the study on the experiences, perceptions, and actions of the communities involved in the PIR V program. This study uses a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the constraints faced in the implementation of the government program. The methods employed include direct observation and interviews with informants. The findings reveal that various obstacles—such as limited infrastructure, weak management, high maintenance costs, fluctuating palm oil prices, and the lack of processing facilities—are the main factors contributing to the program's failure. Policy evaluation, infrastructure improvement, subsidies, and the development of adequate processing facilities are proposed as solutions to revitalize the program.

Keywords: Government Policy, Palm Oil, Constraints, Implementation, Policy Evaluation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara komprehensif tentang perkembangan Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di wilayah PIR V di kawasan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Perangkat analisis menggunakan disiplin ilmu Sosiologi melalui penerapan teori tindakan sosial dari Max Weber, teori hegemoni dari Gramsci, serta pemikiran tentang empati dan rasa keadilan dari Adam Smith, artikel ini memfokuskan kajian pada pengalaman, persepsi dan tindakan masyarakat yang terlibat dalam program PIR V. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya manajemen, biaya perawatan yang tinggi, fluktuasi harga sawit, serta ketiadaan fasilitas pengolahan, menjadi faktor utama penyebab kegagalan program ini. Evaluasi kebijakan, peningkatan infrastruktur, subsidi, serta pembangunan fasilitas pengolahan yang memadai menjadi solusi yang diusulkan untuk menghidupkan kembali program tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Kelapa Sawit, Hambatan, Pelaksanaan, Evaluasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) merupakan program inisiatif pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pertanian, khususnya kelapa sawit, yang telah lama dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan nasional. Program PIR merupakan realisasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Berdasarkan

Instruksi Presiden tersebut, program PIR dicanangkan dalam rangka meningkatkan produksi komoditi non minyak dan gas bumi, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang keberhasilan program transmigrasi.

Kabupaten Keerom terletak di Provinsi Papua. Wilayah kabupaten ini strategis dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Keerom memiliki wilayah yang luas dengan lahan potensial, sehingga memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi salah satu pusat produksi perkebunan di Papua. Salah satu program yang digagas untuk memanfaatkan potensi ini adalah Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) V. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat transmigrasi, khususnya petani kecil, sehingga masyarakat tersebut dapat mengelola hasil panen sawit.

Program ini juga selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu untuk melaksanakan pembangunan perkebunan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkuat pondasi sistem pertanian *bio-industri* berkelanjutan (Ditjenbun; 2019). Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di wilayah PIR V, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor tradisional seperti berburu atau berkebun subsistem.

Program PIR V mulai dilaksanakan pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Namun dalam implementasinya, program PIR V menemui berbagai kendala yang membuatnya tidak berjalan optimal. Diantaranya adalah kurangnya pendampingan dan pelatihan kepada petani untuk mengelola perkebunan secara profesional, kurangnya infrastruktur pendukung, dan banyak kawasan perkebunan yang sulit dijangkau sehingga mempersulit distribusi hasil panen ke pabrik sawit yang terletak di Arso 12.

Selain itu, petani mandiri juga kurang mendapatkan akses pengelolaan sehingga hasil panen mereka sering kali tidak terjual dengan harga yang layak. Seperti diberitakan *Jerat Papua* (2016), macetnya pengelolaan buah di pabrik kelapa sawit dan manajemen PT. Perusahaan Negara (PN) II Arso telah terjadi sejak tahun 2000-an. Hal tersebut berdampak pada masyarakat petani sawit di Arso, Kabupaten Keerom. Banyak petani yang kehilangan motivasi untuk mengelola lahan mereka sehingga banyak pula lahan sawit yang terkendala dalam melanjutkan aktivitas bertani sawit.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan proses perkembangan perkebunan kelapa sawit serta dampak dari program pengembangan kelapa sawit pemerintah di Perkebunan Inti Rakyat (PIR V) di Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua. Penelitian ini merupakan studi Sosiologi terhadap implementasi program PIR V di wilayah Kabupaten Keerom tersebut. Untuk melakukan analisis, penelitian ini menerapkan teori Max Weber terhadap fenomena perkembangan program PIR V melalui perilaku individu maupun kelompok. Sebagaimana dikutip Muhlis & Norkholis (2016), Max Weber menyatakan bahwa pada dasarnya masing-masing perilaku mempunyai motif serta tujuan yang memiliki perbedaan terhadap suatu tindakan yang dilaksanakan. Ada empat tipe tindakan yang membedakan motif bagi para pelakunya, yaitu: tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Melalui teori ini, motif dan tujuan perilaku setiap individu maupun kelompok terhadap sebuah tindakan yang dilakukan bisa dipahami.

Fenomena program PIR V dalam penelitian ini juga dianalisis melalui pemikiran Gramsci tentang hegemoni. Menurut Gramsci, sebagaimana dikutip Asri Syahfitri, *et.al*, (2023), suatu organisasi konsensus terjadi dimana ketertundukan didapatkan dengan cara penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Konsensus terwujud disebabkan terdapatnya dasar persetujuan. Sebuah konsensus yang didapatkan oleh kelas pekerja pada intinya memiliki sifat pasif, dalam artian konsensus terjadi tidak dikarenakan kelas pekerja beranggapan struktur sosial yang ada itu merupakan keinginannya, namun lebih disebabkan mereka kekurangan basis konseptual yang memiliki kemungkinan mereka memiliki pemahaman tentang realitas sosial dengan cara efektif. Agus A dalam Inayati, *et.al*, (2021) menyatakan bahwa hegemoni merupakan suatu kemenangan yang didapatkan dengan cara penindasan pada kelas sosial lainnya. Hegemoni berfokus pula kepada kedudukan ideologi dari satu atau lebih kelompok pada masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lain

Dalam kondisi seperti ini, maka empati dan rasa keadilan menjadi hal yang penting. Merujuk pada pemikiran Adam Smith, empati dan rasa keadilan merupakan fondasi utama dari tindakan manusia. Menurutnya, perilaku manusia tidak serta merta didorong oleh kepentingan pribadi (*self-interest*), namun juga oleh kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi orang lain. Dari sini muncul konsep "pengamat tidak memihak" (*impartial spectator*), yang menggambarkan bagaimana

seseorang bisa melakukan evaluasi terhadap tindakannya sendiri dari sudut pandang yang netral dan objektif (Astuti, *et.al*, 2024).

Untuk memahami individu sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi yang dirumuskan Goffman. Menurut Goffman, sebagaimana dikutip Suneki (2012), individu sebagai analisis di dalam Sosiologi, khususnya terdapat pada aspek interaksi tatap muka, mewujudkan apa yang disebut sebagai dramaturgi. Menurut Suneki, dramaturgi Goffman ini berada diantara "interaksi sosial juga fenomenologi". Interaksi sosial ini berkaitan dengan menafsirkan makna, baik terhadap individu maupun kelompok.

Terkait dengan perkembangan suatu usaha atau perusahaan, penelitian ini merujuk pemikiran Mankiw (2020) dalam *Principles of Economics* sebagai perangkat analisis. Menurut Mankiw, biaya produksi berubah seiring dengan jumlah *output* yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya ini terbagi dalam beberapa jenis, di antaranya adalah biaya tetap atau biaya yang tidak mengalami perubahan walaupun produksi meningkat, seperti biaya sewa gedung, dan biaya variabel yang bergantung pada jumlah *output*, seperti biaya bahan baku. Kemudian, biaya total yang merupakan penggabungan dari biaya tetap serta biaya variabel. Selain itu, ada juga biaya rata-rata yang didasarkan pada perhitungan melalui pembagian biaya total dengan jumlah *output*. Begitu juga biaya marjinal, merujuk pada penambahan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi satu unit *output* tambahan.

Terkait dengan proses produksi suatu usaha, Tjiptono F sebagaimana dikutip Arianto, Yunus Handoko & Widi Dewi (2023), mengingatkan pentingnya fasilitas sebagai sumber daya fisik yang harus ada sebelum sesuatu ditawarkan pada konsumen. Fasilitas adalah sesuatu yang penting untuk usaha jasa. Fasilitas meliputi kondisi fasilitas, desain interior-eksterior serta kebersihan, hendaknya dilakukan pertimbangan khususnya karena berhubungan erat dengan apa yang dirasakan oleh konsumen secara langsung.

Selain teori yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perkebunan kelapa sawit. Penelitian Eka Wulandari & Aprisep Ferdhana Kusuma (2023), dengan judul *Kelapa Sawit Indonesia: Dilema dan Solusi yang Tidak Kunjung Usai*, terbit pada jurnal *Khatulistiwa Profesional*, menyebutkan bahwa sertifikasi yang ditawarkan pada kenyataannya tidak dapat direalisasikan terutama dalam tipe perkebunan kelapa sawit monokultur yang dimiliki rakyat disebabkan berbagai alasan. Penelitian ini menyarankan pada pemerintah agar membuat tipologi perkebunan kelapa sawit, melakukan evaluasi berbagai solusi yang ada serta melakukan penentuan tentang mana yang terbaik untuk tiap-tiap tipologi tersebut.

Penelitian Dwi Wulansari (2021) berjudul *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Pelaksanaan (replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Lembah Kumang Tahun 2019*, terbit pada jurnal *Politik dan Pemerintah Daerah* menyatakan perlunya evaluasi kebijakan pemerintah dalam realisasi *replanting* perkebunan kelapa sawit di Dusun Lembah Kumang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Peremajaan (*replanting*) ialah melakukan penanaman kembali (tanaman sejenis atau tanaman sebelumnya) dengan alasan tanaman asal sudah terlalu tinggi dengan demikian mengalami kesulitan untuk melakukan pemanenan, terlalu tua atau produktivitasnya dipandang rendah.

Penelitian Chelsia Fatwa, Firdaus & Hengki Firmandan (2023) berjudul *Penyelesaian Konflik Antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (Knes) Dengan Masyarakat Adat Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*, yang terbit pada jurnal *Multilingual: Journal of Universal Studies* menilai tidak adanya transparansi mengenai sisa hasil usaha (SHU) yang diterima masyarakat adat pemilik perkebunan kelapa sawit yang dikelola Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES). Terdapat upaya penyelesaian konflik melalui perundingan dan musyawarah, namun belum membuahkan hasil. Polres Kampar kemudian menghentikan upaya terakhir yaitu litigasi karena bukan perkara pidana.

Penelitian Muhammad Risal (2018), berjudul *Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi*, yang terbit pada *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* mengungkapkan bahwa kehadiran suatu perusahaan multinasional/MNC yang bergerak pada bidang kelapa sawit mempunyai dampak pada bidang ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan. Namun demikian, kehadiran MNC kelapa sawit juga mempunyai konsekuensi yang serius berkaitan dengan laju deforestasi hutan, bencana alam, ancaman pada kearifan budaya lokal, sampai dengan kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang

melakukan pekerjaan sebagai buruh pada perkebunan yang dimiliki oleh MNC-MNC tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian Wike Anggraini, Rossy Lambelanova & Nurasih Ritonga (2022), berjudul *Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Kampung Rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan*, yang terbit pada *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, menyebutkan bahwa pemberdayaan petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipandang belum optimal. Hal ini karena dari enam tahapan pemberdayaan, hanya dua tahapan yang terealisasi secara baik. Standar pengetahuan petani yang masih rendah, ketidakstabilan harga jual kelapa sawit, sarana juga prasarana yang belum mencukupi serta ketidakpercayaan anggota pada kepengurusan kelompok tani menyebabkan beberapa hambatan pada proses pemberdayaan tersebut.

Penelitian terdahulu yang diuraikan di atas dinilai relevan dengan penelitian ini, yaitu mengkaji permasalahan perkebunan sawit yang merupakan program pemerintah dengan melibatkan para petani. Namun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu pada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah adanya program pemerintah pada tahun 1995 sampai 1996 yang dikelola oleh masyarakat melalui program PIR V, yang dalam perjalanannya tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan biaya operasional yang tinggi, dan macetnya pabrik pengelolaan sawit yang terletak di Arso 12 Kabupaten Keerom Propinsi Papua.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah di Perkebunan Inti Rakyat (PIR V) di Kabupaten Keerom. Metode ini digunakan karena fokus penelitian adalah pemahaman secara mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan tindakan masyarakat yang terlibat dalam program PIR V. Penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi sosial. Schutz & Luckman mengatakan bahwa:

Fenomenologi sosial dimaksudkan untuk merumuskan ilmu sosial yang dapat ‘melakukan penafsiran serta menjelaskan tindakan juga pemikiran manusia’ melalui cara mendeskripsikan struktur-struktur dasar.... realita yang nampak ‘nyata’ di mata setiap orang yang berpegang teguh pada ‘sikap alamiah’ (Denzin & Lincoln, 2009:337).

Setting penelitian dilakukan di Kabupaten Keerom, khususnya pada wilayah PIR V yang merupakan wilayah transmigran. Wilayah ini dipilih karena merupakan pusat pelaksanaan program dan menjadi lokasi permasalahan utama yang terkait dengan kebijakan pemerintah, dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Informan kunci pada penelitian ini ialah tokoh masyarakat lokasi PIR V, petani plasma, serta peneliti sendiri. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model bagan alir yang dirumuskan oleh Miles & Huberman, yang membagi analisis data kedalam tiga tahapan yaitu:

- 1) Reduksi data (*Data reduction*), yaitu melibatkan penyederhanaan, seleksi, dan pengelompokan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak penting atau berlebihan disaring agar analisis tetap terfokus pada inti penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengatur data mentah agar menjadi lebih terstruktur dan memiliki makna.
- 2) Penyajian data (*Data display*), yaitu data yang sudah direduksi disusun dalam format yang mudah dipahami, seperti dalam bentuk tabel, diagram, matriks, atau uraian naratif. Tujuan penyajian ini adalah untuk membantu peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan dalam data, yang mendukung proses penarikan kesimpulan; serta
- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*) yaitu melibatkan interpretasi atau pemaknaan data yang telah dianalisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti juga harus melakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut, misalnya dengan membandingkannya dengan data awal atau teori yang relevan, untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasilnya (M. Yusuf & M.S. Nawir, 2021).

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Perkebunan Sawit di Wilayah PIR V

1) Program Pemerintah pada Transmigran

Keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat pada dasarnya berkaitan dengan program transmigrasi. Melalui program tersebut, para transmigran diwajibkan untuk melakukan pengelolaan lahan pertaniannya dengan menanam kelapa sawit. Pada awal pelaksanaan program transmigrasi, para transmigran tidak mengetahui tentang adanya program pemerintah tersebut. Karena itulah, dalam pelaksanaan program pemerintah di PIR V (Perkebunan Inti Rakyat) yang difokuskan pada pengembangan kelapa sawit, para transmigran menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya terkendala.

Gambar 1: Potret Perkebunan Sawit di PIR V Arso Kabupaten Keerom yang Terkendala



Sumber data: Dokumen peneliti, tahun 2024

Program PIR V tersebut memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup transmigran melalui sektor perkebunan sawit yang terstruktur. Namun, pelaksanaannya mengalami hambatan, terutama kurangnya pendampingan terhadap petani. Selain itu, adanya keterbatasan infrastruktur, lemahnya sistem manajemen, serta kurangnya sarana produksi. Akibatnya, banyak transmigran kesulitan mengelola perkebunan secara efektif, sehingga tujuan utama program ini tidak tercapai.

Dengan kondisi yang seperti ini, seharusnya dilakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan supaya program ini mampu berjalan lebih baik, serta memberikan manfaat nyata untuk para transmigran. Hal ini seperti yang diungkapkan salah seorang informan penelitian ini, Mardiyah warga Kampung Yamara PIR V, yang mengatakan sebagai berikut.

“Sebagai masyarakat Kampung Yamara PIR V, saya menilai program pemerintah yang terkendala adalah proyek atau inisiatif yang dirancang oleh pemerintah tetapi tidak terlaksana dengan baik, terhenti di tengah jalan, atau tidak selesai sama sekali. Akibatnya, program tersebut gagal dalam memberikan manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat, selain itu sering kali proyek ini justru menimbulkan masalah baru, seperti infrastruktur yang digunakan, kerusakan lingkungan, atau pemborosan anggaran negara.” (Wawancara pada hari Minggu, 17 November 2024 di Kabupaten Keerom di wilayah PIR V Arso).

Pikiran masyarakat serta tindakan yang diambil terkait dengan terkendalanya program PIR V ini bisa dianalisis melalui teori tindakan sosial Max Weber. Sebagaimana dikutip (Muhlis, & Norkholis, 2016), teori ini berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Melalui teori ini, motif dan tujuan masing-masing perilaku individu maupun kelompok yang berbeda dapat dipahami melalui tindakan yang dilakukan. Weber mengklasifikasikan empat tipe tindakan yang membedakan motif

para pelaku, yaitu: 1) Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun temurun; 2) Tindakan afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor; 3) Rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan, dan 4) Rasionalitas nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagal nya tindakan tersebut.

Dalam kerangka pemikiran ini, maka Program PIR V bisa disebut sebagai tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup sekelompok masyarakat, dalam hal ini adalah para transmigran melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit. Namun persoalannya, program ini menghadapi berbagai tantangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan dalam pelaksanaannya. Hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya sistem manajemen, dan kurangnya pendampingan serta sarana produksi menghalangi transmigran dalam mengelola perkebunan secara efektif. Melalui teori tindakan sosial yang dirumuskan Max Weber, kita bisa memahami motivasi dan perilaku individu atau sekelompok orang dalam melakukan tindakan terhadap program PIR V. Tindakan dengan motif untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, bisa dipahami sebagai tindakan rasionalitas instrumental maupun rasionalitas nilai bagi para pelakunya.

Namun, kegagalan program PIR V di Kampung Yamara, tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis. Hal ini juga berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara motif dan pelaksanaan program. Melalui perspektif Max Weber, terlihat bahwa tindakan sosial dalam konteks kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai motif yang kompleks. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan implementasi program yang merupakan tindakan rasional dari pemerintah yang harus diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini, diantaranya: penguatan sistem manajemen dan kapasitas kelembagaan lokal, penyediaan infrastruktur dan sarana produksi yang memadai, pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam setiap tahap program, serta pendekatan yang memperhatikan aspek nilai dan emosi sosial masyarakat. Dengan mengacu pada pendekatan yang lebih komprehensif dan humanistik, program seperti PIR V berpotensi menjadi alat yang efektif dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran.

2) Kewajiban untuk Melakukan Penanaman Sawit di Transmigran

Program pemerintah di PIR V mengharuskan transmigran menanam kelapa sawit. Hal ini sebagaimana diungkapkan informan penelitian, yaitu Sujito, warga PIR V yang mengatakan sebagai berikut.

“Masyarakat melihat bahwa kewajiban untuk menanam kelapa sawit bagi transmigran di PIR V ini memiliki tanggung jawab yang harus mereka laksanakan dalam mengelola kebun sawit yang dimiliki. PIR (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran melalui perkebunan kelapa sawit. Di PIR V, para transmigran diharuskan menanam sawit secara teratur agar hasil produksi tetap maksimal dan kualitas panen terjaga.” (Wawancara hari Minggu, tanggal 10 November 2024 di Kabupaten Keerom di wilayah PIR V Arso).

Namun persoalannya, dalam hal menanam dan menanam sawit ini para transmigran mengalami berbagai hambatan hingga akhirnya program tersebut terkendala. Tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya dukungan teknis, serta lemahnya pembinaan dan pengawasan menyebabkan banyak transmigran kesulitan melaksanakan kewajiban penanaman dan mengelola kebun secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan agar program ini dapat berjalan secara efektif serta menimbulkan dampak positif untuk kesejahteraan transmigran.

Merujuk pada pemikiran Gramsci, sebagaimana dikutip Asri Syahfitri, *et.al*, (2023), suatu organisasi disebut konsensus ketika ketertundukan didapatkan dengan cara penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Konsensus terwujud disebabkan terdapatnya dasar persetujuan. Menurut Gramsci, sebuah konsensus yang didapatkan oleh kelas pekerja pada intinya memiliki sifat pasif, dalam artian konsensus terjadi tidak dikarenakan kelas pekerja beranggapan struktur sosial yang ada itu merupakan keinginannya. Namun, konsensus terjadi lebih disebabkan mereka kekurangan basis konseptual yang memiliki kemungkinan mereka memiliki pemahaman tentang realitas sosial dengan cara efektif (Siswati, 2018).

Program pemerintah PIR V yang mengharuskan transmigran untuk menanam kelapa sawit, merupakan suatu bentuk konsensus yang dilakukan pemerintah kepada transmigran. Konsensus yang terjadi memiliki sifat pasif, dimana terdapat ketertundukan para transmigran pada program pemerintah untuk melakukan penanaman pohon kelapa sawit di areal pertanian yang dimiliki oleh transmigran, yang mau tidak mau harus dilaksanakan karena berkaitan dengan program pemerintah. Persoalannya, program ini pada akhirnya mengalami berbagai hambatan yang menyebabkan kesulitan bagi transmigran dalam melaksanakan kewajiban penanaman dan pengelolaan kebun secara optimal.

Karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program dan dampaknya terhadap kesejahteraan transmigran, diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan sekedar pemaksaan terhadap para transmigran untuk melaksanakan program. Sebab, ketertundukan kelas pekerja --dalam hal ini petani kelapa sawit dalam program PIR V ini-- mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap struktur sosial yang ada, sehingga diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pengolahan lahan sawit.

Dalam kaitannya dengan evaluasi kebijakan ini, pemikiran Goffman tentang interaksi sosial dan persepsi sangat penting untuk diterapkan. Sebab, kegagalan memenuhi ekspektasi sosial dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat bisa menciptakan ketidakpercayaan, kekecewaan, dan *disengagement* sosial. Pemerintah, dalam hal pelaksanaan program PIR V, telah menjadi aktor yang berdiri di "panggung depan" yang memberikan janji kesejahteraan dan pembangunan melalui program PIR V. Namun, di balik panggung terdapat kegagalan sistemik dan ketidaksiapan infrastruktur (termasuk pabrik sawit yang merugi), yang tidak diperlihatkan secara transparan kepada masyarakat. Transmigran/petani yang merupakan audiens sekaligus aktor yang menerima janji tersebut, pada akhirnya mengalami disonansi antara ekspektasi (peran ideal sebagai petani sukses) dan realitas (tidak adanya pasar dan pengolahan hasil).

Fenomena ini menunjukkan bahwa di dalam melakukan evaluasi kebijakan terhadap program PIR V ini, tidak hanya bisa dilihat dari aspek ekonomi yang gagal. Tetapi juga harus dilakukan pendekatan melalui interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat yang mengalami keretakan. Program yang semestinya memberdayakan transmigran justru menghasilkan ketergantungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, solusi tidak hanya terbatas pada perbaikan teknis pemasaran dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan pemulihan kepercayaan sosial dan transparansi kebijakan, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan Goffman tentang peran sosial dan persepsi publik.

3) Adanya Janji dari Pemerintah tentang Pemasaran

Program pemerintah di PIR V yang fokus utamanya pengembangan kelapa sawit pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dengan menjamin pasar bagi hasil produksi sawit. Namun, program ini mengalami kendala karena tidak terealisasinya janji pemerintah terkait pemasaran hasil panen. Dalam pelaksanaannya, transmigran menghadapi kesulitan menjual hasil panen karena tidak adanya kepastian pasar dan harga yang stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan produktivitas dan kesejahteraan transmigran. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan sistem pemasaran serta komitmen pemerintah dalam mendukung program ini perlu diperkuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh informan Mardiyah yang merupakan warga Kampung Yamara PIR V sebagai berikut:

“Pemerintah akan membuka kembali perkebunan sawit tersebut, akan tetapi kerugian dalam pabrik yang menyebabkan pemerintah tidak jadi membuka kembali lahan sawit. Dan apabila dibuka kembali lahan sawit, tidak ada pabrik yang akan mengelola hasil pemanenan sawit tersebut.” (Wawancara pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024 di Kabupaten Keerom di wilayah PIR V Arso).

Dalam perspektif sosiologi, program dan janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran melalui pengembangan kelapa sawit merupakan interaksi sosial yang menimbulkan penafsiran makna. Dalam pengertian ini, bisa dipahami bahwa para transmigran menjalankan program tersebut dengan penafsiran akan mendapatkan jaminan pemasaran hasil panen sawit sebagai janji kesejahteraan. Namun ketika terjadi kendala, maka teori Goffman tentang dramaturgi bisa diterapkan dalam melakukan analisis

Teori dramaturgi adalah teori yang menjelaskan bahwa interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater atau drama di atas panggung. Goffman menerapkan dramaturgi sebagai pendalaman konsep interaksi sosial, yang merupakan dampak atas fenomena, atau sebuah reaksi terhadap meningkatnya konflik sosial, dampak represif birokrasi dan industrialisasi. Dalam konteks ini, Goffman menekankan analisis sosiologi lebih ditujukan pada individu, khususnya dalam aspek interaksi tatap muka. Karena itulah Goffman menyebut dramaturgi berada diantara "interaksi sosial juga fenomenologi". Interaksi sosial berkaitan dengan menafsirkan makna baik individu kelompok (Suneki, 2012).

Oleh karena itu, meskipun program PIR V dirancang untuk menjamin pasar bagi hasil produksi sawit, kenyataan bahwa transmigran menghadapi kesulitan dalam menjual hasil panen karena kurangnya kepastian pasar dan harga yang tidak stabil, telah berakibat pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Janji-janji awal pelaksanaan program kelapa sawit mampu mensejahterakan masyarakat, pada kenyataannya tidak terealisasikan sehingga tanaman kelapa sawit tidak berproduksi lagi dan tanah tempat dilakukannya penanaman kelapa sawit dibiarkan begitu saja tanpa diolah kembali oleh para petani.

Di sinilah pentingnya untuk melaksanakan evaluasi serta perbaikan pada sistem pemasaran serta memperkuat komitmen pemerintah untuk mendukung program ini. Merujuk pada pemikiran Goffman, dalam evaluasi ini, pemerintah perlu memperkuat interaksi sosial yang berfokus pada individu, yaitu transmigran yang terlibat dalam program penanaman kelapa sawit. Interaksi sosial inilah yang harus dibangun melalui pemaknaan yang positif, baik kepada individu maupun kelompok.

Dalam membangun interaksi sosial, prinsip keadilan penting untuk diterapkan sebagai dasar menciptakan kerja sama sosial dan saling menguntungkan. Sebagaimana dinyatakan John Rawls (2008), merancang suatu masyarakat perlu mengetahui keadaan khusus setiap orang, sehingga individu akan berusaha menciptakan sistem yang menguntungkan semua orang dan meminimalkan kesenjangan. Mereka akan menyadari bahwa distribusi sumber daya dan peluang yang adil akan menghasilkan masyarakat yang lebih stabil, harmonis, dan sejahtera.

Kebijakan publik seharusnya dirancang dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Pentingnya kerja sama sosial dan distribusi yang adil harus menjadi acuan untuk menghindari kegagalan program, terutama yang diakibatkan oleh ketimpangan akses dan kurangnya keadilan distributif bagi para transmigran sebagai kelompok yang rentan. Untuk itu, evaluasi menyeluruh dan reformasi sistem pemasaran serta pembangunan infrastruktur agar program benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, perlu dilakukan.

B. Program Pemerintah di PIR V yang Terkendala

1) Harga Sawit yang Tidak Stabil

Program pemerintah di PIR V yang berfokus pada pengelolaan kelapa sawit dalam implementasinya sulit dilaksanakan secara maksimal karena adanya program-program yang terkendala. Pada program penentuan harga sawit, misalnya. Program ini mengalami kendala serius karena terjadinya fluktuasi harga sawit yang tidak menentu. Ketidakstabilan harga ini menghambat

kelancaran pelaksanaan program, sehingga banyak aspek pengelolaannya terkendala. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur, manajemen yang kurang optimal, serta minimnya pendampingan bagi petani plasma.

Akibatnya, produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di PIR V belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh informan penelitian, Siti Kowiyah yang merupakan warga Kampung Yamara PIR V sebagai berikut:

“Ketidakstabilan harga sawit di PIR V disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah perubahan harga di pasar global yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran minyak sawit. Selain itu harga sawit juga dipengaruhi kualitas hasil panen, biaya pengangkutan, dan kebijakan pemerintah.” (Wawancara pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 di Kabupaten Keerom di wilayah PIR V).

Permasalahan yang disampaikan informan ini semakin kompleks dengan adanya keterbatasan infrastruktur, manajemen yang lemah, dan minimnya pendampingan bagi petani plasma, yang berdampak langsung pada produktivitas serta kesejahteraan petani di wilayah PIR V. Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktural dan sistemik belum mendukung sepenuhnya keberhasilan program. Ditambah lagi, fluktuasi harga sangat memengaruhi kehidupan petani, sementara dukungan yang memadai dari pemerintah belum terasa optimal.

Untuk mengatasi masalah ini, jelas diperlukan upaya dari pemerintah melalui kebijakan untuk menstabilkan harga sawit, memperbaiki tata kelola program, serta menyediakan pendanaan dan pelatihan yang memadai guna menghidupkan kembali program tersebut dan meningkatkan taraf hidup petani. Dalam kerangka ini, pemikiran Adam Smith sebagaimana dikutip Astuti, *et.al*, (2024) penting untuk digunakan sebagai kerangka dasar dalam pengambilan kebijakan, yaitu empati dan rasa keadilan merupakan fondasi utama dari tindakan manusia.

Dalam pandangan ini, Adam Smith menekankan bahwa perilaku manusia tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi (*self-interest*), tetapi juga oleh kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi orang lain. Dalam pemikiran ini kemudian diperkenalkan konsep "pengamat tidak memihak" (*impartial spectator*), yang menggambarkan bagaimana seseorang mengevaluasi tindakannya sendiri dari sudut pandang yang netral dan objektif.

Pendekatan empati dan rasa keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith, penting untuk dijadikan acuan terutama memastikan bahwa tindakan yang diambil lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan petani secara adil, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara efektif. Fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh pasar global, kualitas hasil panen, biaya logistik, dan kebijakan pemerintah menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas program ini.

Pendekatan empati dan keadilan sosial pada intinya menekankan bahwa program pembangunan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi semata, tetapi juga kondisi sosial dan moral masyarakat. Melalui pendekatan sebagaimana ditekankan oleh Adam Smith ini, pemerintah bisa menstabilkan harga sawit melalui kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap pasar global, memperkuat infrastruktur dan manajemen program PIR, memberikan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan kepada petani. Dengan penerapan pendekatan berbasis empati dan keadilan sosial, maka kebijakan akan lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, keberhasilan program PIR V tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada komitmen moral dan sosial pemerintah dalam mendukung petani sawit secara menyeluruh.

2) Perawatan Tanaman Sawit yang Mahal

Program lain yang juga terkendala dalam implementasi program pemerintah di PIR V adalah tingginya biaya perawatan tanaman sawit. Pengeluaran yang besar untuk kebutuhan seperti pupuk, pestisida, dan tenaga kerja yang menjadi beban bagi petani, menyebabkan banyak kebun sawit kurang terawat dan hasil produksinya menurun.

Hal ini diungkapkan oleh informan Mardiyah, warga Kampung Yamara PIR V sebagaimana berikut ini:

“Untuk merawat atau pembersihannya sangatlah mahal sehingga menyebabkan masyarakat perkebunan kelapa sawit di PIR V menghadapi tantangan berupa biaya perawatan yang cukup tinggi. Tingginya biaya ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan pupuk yang mahal dan harus dilakukan secara rutin, pengendalian hama serta penyakit yang memerlukan pestisida dan fungisida, hingga perbaikan infrastruktur kebun seperti jalan dan sistem irigasi. Selain itu, penggunaan alat berat dan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi kerja juga menambah beban pengeluaran. Biaya tenaga kerja, terutama untuk pemangkasan, panen, dan pemeliharaan kebun, menjadi salah satu komponen utama dalam pengelolaan perkebunan. Meski demikian, petani dapat mengatasi masalah ini melalui strategi seperti penggunaan pupuk organik, peningkatan efisiensi tenaga kerja, dan pembelian bahan perawatan secara kolektif, sehingga biaya perawatan dapat ditekan tanpa mengurangi produktivitas kebun.” (Wawancara pada hari Minggu, 17 November 2024 di Kabupaten Keerom di wilayah PIR V Arso).

Situasi ini secara jelas menunjukkan perlunya intervensi dari pemerintah. Namun persoalannya, intervensi pemerintah saat ini baru sebatas pada penggelontoran dana untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (Syahrul, 2024). Sementara, untuk penanamannya belum terlaksana, walaupun sebagian kelapa sawit petani yang sudah tidak berproduksi lahan kelapa sawitnya telah ditebang untuk dilakukan peremajaan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka pemberian dukungan seperti subsidi, pelatihan teknis, dan akses pembiayaan yang lebih terjangkau sangat diperlukan bagi para petani tanaman sawit. Melalui dukungan ini, diharapkan beban petani dapat berkurang, perawatan kebun dapat ditingkatkan, dan hasil produksi sawit dapat optimal untuk memperbaiki kesejahteraan petani serta memastikan kelangsungan program tersebut. Atau meminjam istilah Mankiw (2020), dukungan ini bisa disebut sebagai dukungan terhadap biaya produksi.

Menurut Mankiw, konsep penting dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana biaya produksi berubah seiring dengan jumlah *output* yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi biaya yang tidak mengalami perubahan walaupun produksi meningkat, seperti biaya sewa gedung. Sedangkan biaya variabel bergantung pada jumlah *output*, seperti biaya bahan baku. Biaya total merupakan gabungan dari biaya tetap serta biaya variabel. Adapun biaya rata-rata, dihitung berdasarkan pembagian biaya total dengan jumlah *output*. Sementara biaya marjinal merujuk pada tambahan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi satu unit *output* tambahan.

Beban biaya untuk mengelola kelapa sawit cukup besar. Demikian pula dengan biaya perawatan tanaman sawit, yang mencakup pengeluaran untuk pupuk, pestisida, dan tenaga kerja bisa menjadi kendala bagi para petani penanam sawit. Untuk mengatasi masalah ini, intervensi pemerintahan sangat diperlukan. Pemahaman tentang biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marjinal bisa membantu untuk melakukan perumusan strategi yang lebih efektif agar dapat mengelola biaya dan melakukan peningkatan efisiensi produksi. Melalui dukungan ini, beban yang ditanggung petani dapat berkurang, perawatan kebun dapat ditingkatkan, dan hasil produksi sawit dapat optimal. Langkah ini bisa memperbaiki kesejahteraan petani dan memastikan kelangsungan program.

3) Tidak Adanya Pabrik Pengelolaan Sawit

Program terkendala dalam program pemerintah di PIR V yang lain adalah kurangnya fasilitas pabrik pengelolaan sawit di wilayah tersebut. Tanpa adanya pabrik pengolahan yang memadai, hasil panen sawit dari petani tidak dapat diproses secara optimal, yang menyebabkan penurunan nilai jual dan kerugian bagi petani. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengolahan sangat diperlukan di kawasan PIR V. Pemerintah harus mengambil langkah untuk membangun pabrik pengolahan sawit yang dapat menyerap hasil petani, menambah nilai produk, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, program ini bisa berjalan lebih baik dan membawa manfaat bagi kesejahteraan petani sawit.

Hal ini seperti yang diutarakan informan Sujito warga PIR V yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai masyarakat Kampung Yamara PIR V menilai bahwa perkebunan kelapa sawit di PIR V menghadapi tantangan besar akibat ketiadaan pabrik pengolahan di dekat lokasi kebun. Hal ini mengakibatkan biaya transportasi tinggi, penurunan kualitas buah karena jarak pengiriman yang jauh, serta keterlambatan pengolahan yang sering membuat buah membusuk. Selain itu, petani menjadi bergantung pada perantara dengan daya tawar rendah, sehingga pendapatan mereka menurun. Kondisi ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal karena potensi lapangan kerja dari pabrik tidak terwujud. Solusi yang dapat diupayakan meliputi pembangunan pabrik kecil, kemitraan dengan investor, dan perbaikan infrastruktur transportasi untuk mendukung distribusi hasil panen secara lebih efisien”. (Wawancara pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 di Kabupaten Keerom di wilayah PIR V Arso).

Gambar 2: Potret Pabrik Kelapa Sawit di Arso XII Kabupaten Keerom yang Sudah Tidak Beroperasi



Sumber Data: Dokumen peneliti tahun 2024

Pabrik pengolahan yang memadai sebagai tempat untuk memproses hasil panen sawit dari petani merupakan fasilitas penting yang seharusnya disiapkan dalam program PIR V. Pabrik ini tidak saja berkaitan dengan hasil panen sawit, tetapi juga penting dalam proses produksi sawit. Merujuk pada pemikiran Tjiptono F, sumber daya fisik seharusnya ada sebelum sesuatu ditawarkan pada konsumen. Ditegaskan oleh Tjiptono F, fasilitas adalah sesuatu yang penting pada usaha jasa. Yang dimaksud fasilitas dalam pengertian ini meliputi kondisi fasilitas, desain interior serta eksterior juga kebersihan. Hal ini hendaknya dilakukan pertimbangan terutama yang berhubungan erat dengan apa yang dirasakan konsumen secara langsung (Arianto, Yunus Handoko & Widi Dewi, 2023).

Dengan demikian, fasilitas pabrik pengolahan sawit yang baik sangat penting bagi pengembangan program PIR. Terlebih lagi, di dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, dalam ketentuan umum poin 1 butir ke 4 dinyatakan bahwa: *Perkebunan Inti adalah perkebunan besar lengkap dengan fasilitas pengolahannya yang dibangun (dikembangkan) dan dimiliki oleh perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan program PIR.*

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah hendaknya mengambil langkah membangun pabrik pengolahan sawit yang dapat menyerap hasil petani, meningkatkan nilai produk, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya fasilitas yang memadai, program tersebut diharapkan mampu terealisasi lebih baik serta memberikan manfaat yang signifikan untuk kesejahteraan petani sawit. Keberadaan sumber daya fisik ini sangat relevan, karena fasilitas yang baik serta terencana

akan mampu meningkatkan pengalaman konsumen serta efisiensi operasional dalam usaha pengolahan sawit.

SIMPULAN

Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) V merupakan program inisiatif pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pertanian, khususnya kelapa sawit untuk memanfaatkan wilayah Kabupaten Keerom yang luas dan potensial. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat transmigrasi, khususnya petani kecil, sehingga masyarakat tersebut dapat mengelola hasil panen sawit.

Program PIR V yang mulai dilaksanakan pada tahun 1995 sampai tahun 1996 dalam implementasinya menemui berbagai kendala yang membuatnya tidak berjalan optimal. Pemerintah yang menjanjikan adanya pasar dan harga stabil untuk hasil panen sawit, tidak dapat merealisasikan janji tersebut. Akibatnya, petani transmigran kesulitan menjual hasil panen dan mengalami kerugian. Kendala lain adalah tidak adanya pabrik pengolahan sawit di wilayah PIR V yang menyebabkan hasil panen tidak dapat diproses. Akibatnya, nilai jual hasil panen menjadi rendah dan merugikan petani.

Pemerintah perlu menciptakan mekanisme penyangga harga dan pasar agar hasil panen petani tidak tergantung sepenuhnya pada fluktuasi pasar global. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk mendorong keterlibatan aktif transmigran dalam perencanaan dan evaluasi program untuk meningkatkan rasa kepemilikan, mengedepankan empati, nilai sosial, dan keadilan dalam setiap tahapan program agar masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan.

Saran peneliti terhadap temuan penelitian, hendaknya pemerintah mendirikan pabrik pengolahan sawit di wilayah PIR untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan hasil panen. Pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan teknis dan penguatan kelembagaan lokal agar petani lebih mandiri dan terorganisir. Pemerintah harus menciptakan mekanisme penyangga harga dan pasar agar hasil panen petani tidak tergantung sepenuhnya pada fluktuasi pasar global. Kemudian, mendorong keterlibatan aktif transmigran dalam perencanaan dan evaluasi program untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Terakhir, mengedepankan empati, nilai sosial, dan keadilan dalam setiap tahapan program agar masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W., Lambelanova, R., & Ritonga, N. (2022). Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2), 72-92. DOI: <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2525>
- Arianto., Handoko, Y., & Dewi, W. (2023). Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan di Imam Bonjol Hostel Semarang. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 88–100. DOI: <https://doi.org/10.59086/jeb.v2i1.236>
- Astuti, A., Hasibuan, Z., Br. Harefa, W., & Purba, B. (2024). Kajian Teori Pemikiran Adam Smith dan Relevansinya terhadap Perekonomian Masa Kini. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 472–480. DOI: <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.153>
- Denzin, K. Norman., & Lincoln, S. Yvonna. (2009). HandBook Of Qualitative Research. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. Kementerian Pertanian (2019). Visi Misi. https://ditjenbun.pertanian.go.id/profil/visi-misi/?utm_source=chatgpt.com
- Fatwa, C., & Firmanda, H. (2023). Penyelesaian Konflik Antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (Knes) Dengan Masyarakat Adat Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(3), 281-294. DOI:<https://doi.org/10.26499/multilingual.v3i3.322>
- Inayati., Muhandy, R. S., Nur, Rohmah, M., Yusuf, M., & Iribaram, S. (2021). Potret Penerapan Sosial Distancing Dalam Memutus Rantai COVID-19 . *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 128–140. <https://doi.org/10.30997/jsh.v12i2.4146>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi
- Jerat Papua, Jaringan Kerja Rakyat Papua. (2016). Problematika Perkebunan Sawit di Keerom. https://www.jeratpapua.org/problematika-perkebunan-sawit-di-keerom/?utm_source=chatgpt.com
- Mankiw, N. G. (2020). Principles of Economics. *Cengage Learning*.
- Muhlis, A., & Norkholis, N. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-bukhari (Studi Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 242-258. DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1121>
- Rawls, John. (2008). Justice as Fairness, Justice Within a Liberal Society. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/rawls/#JusFaiJusWitLibSoc>
- Risal, M. (2018). Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 3(1). DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/v3i1.1332>
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), Hal. 11-33. DOI: <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Suneki. (2012). Paradigma Teori Dramaturgi Terhadap Kehidupan Sosial. *Civis*, 2(2), 1–11. DOI: <https://core.ac.uk/download/pdf/234022407.pdf>
- Syahfitri, A., Yusuf, M., Safiudin, S., Amri, A., & Muhandy, R. S. (2023). Pembangunan Rumah Yang Dilakukan Masyarakat Di Bantaran Kali Anafre Kota Jayapura. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 269–285. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2415>
- Syahrul. (2024). Kebun Sawit 661 Hektar Berubah Jadi Semak Belukar. https://www.kabarsawit.com/berita/2671/kebun-sawit-661-hektar-berubah-jadi-semak-belukar?utm_source=chatgpt.com
- Wulandari, Eka., & Kusuma, Aprisep, Ferdhana. (2023). Kelapa Sawit Indonesia: Dilema dan Solusi yang Tidak Kunjung Usai. *Jurnal Khatulistiwa Profesional*, 4(2), 57-68. DOI:<https://doi.org/10.62099/khapro.v4i2.70>
- Wulansari, Dewi. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Pelaksanaan (Replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Lembah Kumang Tahun 2019. *Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah*, 3(1), 35-51. DOI:<https://jppd.org/index.php/jppd/article/download/27/26>

Yusuf, M., & Nawir, M.S. (2021). Famari (Penghinaan Berujung Pada Tradisi Yang Mampu Menyebabkan Sanksi/Denda Adat, Tradisi Pada Masyarakat Misool Barat, Kepulauan Raja Ampat). *SASI*, 27(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.225>

Wawancara

Kowiyah, Siti. (2024). Wawancara pada tanggal 24 hari minggu bulan November 2024 di Kabupaten Keerom di wilayah PIR V Arso

Mardiyah. (2024). Wawancara pada tanggal 17 hari minggu bulan November tahun 2024 di Kabupaten keerom di wilayah PIR V Arso

Sujito. (2024). Wawancara pada tanggal 10 hari minggu bulan November tahun 2024 di Kabupaten Keerom di wilayah PIR V Arso